

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Hakekat Pemberdayaan**

###### 2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan atau pemberdayaan masyarakat sudah tidak asing lagi karena sudah sering kita dengar, dimana hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan daya atau *power* kepada masyarakat melalui suatu program yang dibuat baik itu oleh pemerintah, lembaga atau organisasi sosial, dan lainnya. Pemberdayaan erat kaitannya dengan pembangunan, pemberdayaan ada karena adanya suatu kondisi dimana terjadinya kesenjangan serta masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah lainnya. Pemberdayaan diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Pengentasan kemiskinan menjadi target utama dari adanya program-program pemberdayaan yang dibuat. Namun pada kenyataannya memang belum semuanya dapat dikatakan berhasil atau mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Marzuki (2010) mengemukakan bahwa pemberdayaan atau *empowerment* merupakan sebuah pemberian daya atau kekuatan kepada seseorang karena dianggap tidak berdaya atau kekuatan yang ada sangat kecil sehingga hampir tidak dapat berbuat apa-apa. Dapat dikatakan seperti halnya orang yang pendidikannya rendah, di samping tidak mempunyai banyak peluang, juga tidak mempunyai banyak pilihan untuk bertindak dan mengambil keputusan. Sejalan dengan hal tersebut menurut Suyono (2004) dalam bukunya Marzuki (2010) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan proses pengembangan manusia agar memiliki kapasitas penuh, memiliki pilihan-pilihan yang lebih luas dan kesempatan yang lebih besar sehingga mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat dan lebih makmur.

Menurut Edy (2018) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dalam memberdayakan

masyarakat harus senantiasa berkesinambungan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang kurang mampu untuk dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga dapat mencapai taraf kemakmuran. Dengan demikian masyarakat mampu untuk dapat meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat agar dapat menumbuhkan keberanian untuk dapat menyuarkan aspirasinya serta kemampuan dan keberanian untuk mendapatkan pilihan pada kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses terencana guna meningkatkan skala kegunaan atau fungsi dari obyek yang diberdayakan. Masyarakat sebagai obyek pemberdayaan mempunyai keterbatasan, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan dari berbagai aspek. Sehingga guna mengupayakan mengurangi kesenjangan diperlukan upaya merevitalisasi untuk mengoptimalkan kegunaan melalui penambahan nilai.

Menurut Friedmann (1992) dalam bukunya Muhammad (2012) mengemukakan bahwa pemberdayaan atau *empowerment* sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, partipatif, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Konsep pemberdayaan atau *empowerment* merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik di tingkat ideologis maupun praksis. Di tingkat ideologis, konsep pemberdayaan atau *empowerment* merupakan hasil interaksi antara kosep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people-centered strategy*. Sedangkan di tingkat praksis, interaktif akan terjadi melalui interaksi antara rumah tangga dan masyarakat yang otonom.

Menurut Anwas (2014) dalam bukunya Utami (2019) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bisa mendorong peningkatan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, dan mengubah cara pandang masyarakat untuk mandiri dan berdaya.

#### 2.1.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Utami (2019) mengemukakan bahwa harus dapat memberdayakan individu atau sekelompok masyarakat melalui penguatan kapasitas, seperti kesadaran, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengubah kualitas hidup individu maupun kelompok tersebut. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mampu menghasilkan produk, dan mendapatkan manfaat dari produk yang dihasilkan.

Menurut Mardikanto (2015) dalam bukunya Maryani (2019) mengemukakan bahwa terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Perbaikan kelembagaan diharapkan dapat mengembangkan jejaring kemitraan usaha.

2. Perbaikan usaha (*better business*)

Dari perbaikan kelembagaan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki usaha atau bisnis yang dilakukan yang dapat memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota serta memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat di sekitarnya.

3. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dari perbaikan bisnis atau usaha diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan atau *income*. Perbaikan pendapat yang diperoleh anggota lembaga tersebut juga termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Dari perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Dengan perbaikan tingkat pendapatan dan perbaikan keadaan lingkungan yang memadai, maka diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan keluarga dan masyarakat pada kehidupan yang lebih layak.

6. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Dengan kehidupan keluarga yang baik maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Perbaikan masyarakat didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang baik, sehingga dapat terwujudnya kehidupan masyarakat pada arah yang lebih baik.

Menurut Edy (2018) mengemukakan bahwa pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sukses dan berhasil apabila dapat mencapai tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Masyarakat mampu untuk mandiri dan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.
2. Berkurangnya masyarakat yang kekurangan atau miskin.
3. Meningkatnya kepedulian dan respon masyarakat terhadap perlunya peningkatan mutu hidup.

#### 2.1.1.3 Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Menurut Anwas (2016) dalam bukunya Utami (2019) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, bakat, masalah, minat, dan potensi yang berbeda-beda.
2. Kegiatan pemberdayaan dilandaskan pada kebutuhan, masalah, dan potensi masyarakat. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki kebutuhan dan potensi dalam dirinya. Proses pemberdayaan mulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk dapat mandiri.
3. Sasaran pemberdayaan merupakan subyek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan

menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.

4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong royong, kerjasama, dan musyawarah mufakat merupakan bagian dari jati diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
5. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis mulai dari hal-hal yang sederhana hingga hal-hal yang kompleks.
6. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
7. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
8. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
9. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki hasrat untuk belajar secara berkelanjutan dan terus menerus. Masyarakat perlu dilatih untuk terbiasa belajar dengan memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia di sekitar. Sumber belajar tersebut dapat berupa pengalaman, kondisi lingkungan, teknik, bahan baku, dan lain sebagainya. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menggunakan prinsip belajar sambil bekerja.
10. Pemberdayaan perlu memperhatikan keberagaman budaya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi serta partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
12. Perlunya menanamkan jiwa kewirausahaan pada masyarakat sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan dapat dimulai dari kemauan untuk berinovasi, keberanian untuk mengambil resiko terhadap perubahan, mencari dan memanfaatkan peluang, serta mengembangkan jaringan dan mitra sebagai salah satu hal yang esensial untuk memudahkan promosi dan pertukaran dalam era globalisasi.
13. Agen pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan (permintaan) masyarakat. Dalam konteks ini agen pemberdayaan berperan sebagai fasilitator.
14. Pemberdayaan hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang ada dan terkait dengan masyarakat mau berpartisipasi, mulai dari unsur pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, relawan, dan anggota masyarakat itu sendiri. Pihak-pihak yang berpartisipasi dilibatkan sesuai dengan peran, kemampuan (bidang), dan wewenang yang diberikan.

#### 2.1.1.4 Tahapan-tahapan Pemberdayaan

Menurut Suryana (2010) mengemukakan bahwa tahap-tahap yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya atau aktor berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap ini masyarakat akan belajar menjalani proses tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi

tuntutan kebutuhan mereka, di dalam tahap ini masyarakat akan memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sebagai pengikut atau obyek pembangunan saja.

- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan dan peningkatan intelektual dan kecakapan yang diperlukan, masyarakat telah mencapai tahap ini berarti dapat secara mandiri melakukan pembangunan, pada kondisi seperti ini masyarakat seringkali didudukan sebagai subyek pembangunan atau peran utama.

Menurut Soekanto (1987) dalam bukunya Maryani (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu :

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dilakukan yaitu pertama penyiapan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker* dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.

2. Tahap pengkajian (*assemsment*)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki masyarakat.

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*agent exchange*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program kegiatan yang dapat dilakukan.

4. Tahap memformalisasi rencan aksi

Pada tahapan ini *agent exchange* membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal penyandang dana.

5. Tahap implementasi program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

6. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunitas masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Akan tetapi dengan adanya tahap terminasi ini diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program pemberdayaan yang telah dikembangkan meskipun sudah tidak ada lagi pendampingan.

#### 2.1.1.5 Strategi Pemberdayaan

Menurut Suharto (2005) dalam bukunya Huraerah (2008) mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui aras atau matras pemberdayaan (*empowerment setting*), yaitu aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dan dinamika

kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat agar memiliki kemampuan untuk dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Menurut Chambers (1992) dalam bukunya Utami (2019) mengemukakan bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya menggunakan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA (*Participatory Rural Appraisal*) adalah suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan.

#### 2.1.1.6 Proses Pemberdayaan

Menurut Widjajanti (2011) dalam bukunya Handono (2020) mengemukakan bahwa proses pemberdayaan merupakan akses secara menyeluruh dan berkaitan masyarakat yang kooperatif dalam penentuan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi secara bersama. Proses pemberdayaan dilihat dari beberapa aspek, yaitu *quality* dan *quantity* partisipasi masyarakat, *planning* program, *actuating* program, dan sinergi evaluasi secara berkelanjutan serta adanya monitoring atau *controlling* dalam proses pemberdayaan tersebut.

### 2.1.2 Konsep Pemberdayaan Perempuan

#### 2.1.2.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Menurut Kabeer (1999) dalam jurnal Galistya (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan proses dimana perempuan dapat membuat pilihan hidup strategis dengan kemampuan yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Puspita (2016) dalam jurnal Diwanti (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan serta laki-laki di semua bidang pembangunan. Kesetaraan dalam segala bidang baik perempuan dan laki-laki dimaksudkan dengan tidak adanya diskriminasi antara satu dan lainnya. Setiap orang baik perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dalam berbagai kegiatan pembangunan wilayah.

Menurut Gartina (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan

perempuan sebagai motor penggeraknya menuju keluarga bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Anwas (2014) dalam jurnal Gartina (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan menekankan pada memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain.

#### 2.1.2.2 Indikator Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk dapat memberikan perubahan pada perempuan sehingga terjadi peningkatan kualitas diri dan kemandirian. Menurut Anwas (2014) dalam bukunya Hamid (2018) mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator pemberdayaan perempuan, antara lain :

1. Adanya peningkatan partisipasi perempuan untuk memperoleh perubahan melalui program pemberdayaan.
2. Adanya pelatihan yang dilakukan untuk memperoleh perubahan agar dapat meningkatkan kualitas diri.
3. Adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan perempuan.
4. Adanya perubahan pola pikir bagi para perempuan untuk berdaya serta mandiri.

#### 2.1.2.3 Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Menurut Nugroho (2008) mengemukakan bahwa terdapat tujuan pemberdayaan perempuan, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pemberdayaan sebagai partisipan aktif (subyek) agar tidak sekedar menjadi objek pemberdayaan saja.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, keterlibatan dalam setiap program pemberdayaan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun besar untuk menunjang peningkatan

kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.

4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pemberdayaan pada wilayah tempat tinggalnya.

### **2.1.3 Perempuan Kepala Keluarga melalui Kegiatan Pembuatan Makanan Ringan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Perempuan Kepala Keluarga**

Menurut Mulawarman (2000) mengemukakan bahwa perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan penganbil keputusan dalam keluarga. Hakikat perempuan sebagai kepala keluarga menempati posisi sentral dan strategis dalam rangka tegaknya kehidupan sebuah keluarga. Sebuah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan pada umumnya mengalami kendala untuk membagi waktu untuk mengurus keluarga, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kemandirian pada perempuan kepala keluarga.

Menurut Hubies (2010) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan kepala keluarga sangat potensial dan strategis. Dalam hal ini, paradigma pembangunan dengan orientasi pada otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus tantangan dalam mengembangkan dan menata dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga di tingkat wilayah. Untuk itu partisipasi aktif seluruh golongan masyarakat, seperti pemerintah daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat umum perlu untuk ditingkatkan sinergitasnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat pemberdayaan perempuan kepala keluarga erat kaitannya dengan masalah kemiskinan (ekonomi) dan ketidakberdayaan (dalam berbagai aspek). Pendekatan penguatan (*empowerment*) dilakukan untuk dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Tujuan pendekatan penguatan dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pemberdayaan diarahkan pada upaya memberikan kemampuan dan memberdayakan perempuan melalui kemandirian. Komponen pemberdayaan yang diperkirakan berperan

penting dalam upaya memberdayakan perempuan yang bergerak di sektor usaha kecil adalah dengan memberdayakan kapasitas dan mutu sumber daya diri perempuan melalui pendidikan yang diikuti dengan kegiatan yang ditujukan pada upaya pengorganisasian ekonomi produktif kaum perempuan berbasis kesinambungan. Sebagai aset sumber daya manusia maka perempuan tetap mempunyai peran strategis dalam kelangsungan ekonomi keluarga, karena selain berperan sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak, mereka juga berperan mencari nafkah.

Perempuan Kepala Keluarga merupakan sebuah lembaga yang mengorganisir masyarakat miskin khususnya perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga. Program Perempuan Kepala Keluarga merupakan sebuah upaya pemberdayaan yang komprehensif agar dapat menjadikan provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda lebih pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Program Perempuan Kepala Keluarga diharapkan agar dapat membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda.

Menurut Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bahwa Perempuan Kepala Keluarga mendampingi perempuan miskin yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, dan pengambil keputusan dalam keluarga yang mencakup sebagai berikut :

1. Perempuan yang ditinggal atau dicerai hidup.
2. Perempuan yang suaminya meninggal.
3. Perempuan yang membujang atau tidak menikah.
4. Perempuan bersuami, tetapi oleh karena suatu hal suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga.
5. Perempuan bersuami, tetapi tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin karena suaminya bepergian atau merantau dalam waktu yang lama.

Menurut Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan bahwa program Perempuan Kepala Keluarga dikembangkan berdasarkan persoalan, kebutuhan, dan perkembangan komunitas Perempuan Kepala Keluarga, antara lain sebagai berikut :

1. Lembaga keuangan mikro

Kelompok-kelompok Perempuan Kepala Keluarga difasilitasi untuk mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan dana swadaya dan dilatih mengelolanya secara profesional. Kelompok-kelompok simpan pinjam yang telah berkembang kemudian difasilitasi untuk membentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di tingkat Kecamatan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mandiri dan profesional dapat mengakses dana dari berbagai sumber termasuk bantuan langsung masyarakat dari berbagai program pembangunan sehingga dapat melayani masyarakat luas.

2. Usaha kecil mikro

Perempuan Kepala Keluarga difasilitasi untuk melakukan pengembangan usaha individu dan kolektif. Baik dari usaha yang sudah mereka geluti selama ini maupun usaha-usaha baru sesuai potensi dan manajemen usaha serta mengembangkan jaringan usaha merupakan upaya yang dilakukan bersama Perempuan Kepala Keluarga.

3. Penguatan hukum untuk keadilan

Pembelajaran tentang sistem hukum di Indonesia serta strategi Perempuan Kepala Keluarga mendapatkan keadilan terkait dengan hak dalam perkawinan termasuk akte nikah, akte cerai, akte kelahiran anak dan pembagian harta gono gini. Persoalan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan anak dan perempuan merupakan masalah Perempuan Kepala Keluarga yang juga memputuhkan pendekatan hukum. Perempuan Kepala Keluarga juga dilatih untuk menjadi kader-kader hukum yang memberikan penyuluhan tentang hukum pada masyarakat luas.

4. Pendidikan sepanjang hayat

Fokus Perempuan Kepala Keluarga dan keluarganya terhadap pendidikan formal berbagai jenjang serta pendidikan luar sekolah sepanjang hayat menjadi fokusnya. Pembentukan komite pendidikan desa merupakan upaya Perempuan Kepala Keluarga memperluas kesadaran pentingnya pendidikan dikalangan masyarakat, memberikan masukan pada perbaikan sistem

pendidikan nasional, dan mengelola sumber daya pendidikan seperti beasiswa, pusat belajar masyarakat dan pustaka desa.

5. Hak dan penguatan posisi politik

Perempuan Kepala Keluarga dibangun kesadaran politiknya terutama hak dan kewajiban sebagai warga negara serta meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik yang terjadi. Berlatih menjadi pemilih, sistem kepemimpinan ditingkat masyarakat, hak *budgeting*, hak terlibat dalam pengambilan keputusan, merupakan beberapa fokus pelatihan, lokarya dan diskusi dikalangan Perempuan Kepala Keluarga.

6. Hak kesehatan masyarakat

Membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan dan sanitasi merupakan upaya Perempuan Kepala Keluarga untuk berkontribusi pada perbaikan kesehatan masyarakat. Melalui pembentukan komite kesehatan desa, Perempuan Kepala Keluarga melakukan penyuluhan dan kampanye tentang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, mengakses dan mengelola berbagai sumber daya untuk pengobatan dan peningkatan gizi masyarakat.

### 2.1.3.2 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Purba (2021) mengemukakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Indonesia dan berperan krusial dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Kusinwati (2019) mengemukakan bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaha tersebut.

Menurut Kusinwati (2019) mengemukakan bahwa usaha kecil memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Manajemen tergantung pada pengelolanya.
2. Skala usaha dan jumlah modal relatif kecil.

3. Daerah operasi usaha bersifat lokal.
4. Sumber daya manusia yang terlibat terbatas.
5. Biasanya berhubungan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari.
6. Mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis.

#### 2.1.3.3 Usaha Produksi atau Pengolahan

Menurut Kusinwati (2019) mengemukakan bahwa produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Komponen usaha dalam bentuk barang atau jasa adalah suatu output yang dihasilkan oleh pengusaha yang bergerak di bidang pembuatan barang atau suatu produk. Manajemen produksi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi efisien dalam rangka mencapai tujuan. Manajemen produksi merupakan kegiatan manajemen yang berhubungan dengan pembuatan barang dan jasa. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Setiati (2005) mengemukakan bahwa usaha produksi yaitu suatu industri makanan atau minuman yang merupakan usaha yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, salah satunya yang diperoleh dari industri rumahan (*home industry*).

Menurut Kusinwati (2019) mengemukakan adapun fungsi dari manajemen produksi, sebagai berikut :

- a. Fungsi perencanaan, mencakup penentuan peranan dari kegiatan produksi termasuk perencanaan produk, perencanaan fasilitas, dan perencanaan sumber daya produksi.
- b. Fungsi pengorganisasian, mencakup penentuan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan dibagian produksi untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
- c. Fungsi penggerakan, mencakup kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya.
- d. Fungsi kontrol, mencakup kegiatan mengembangkan standar kualitas, standar waktu kerja dan standar hasil kerja pada bagian produksi.

Manurut Abd'rachim (2021) mengemukakan bahwa dalam kegiatan produksi atau kegiatan pengolahan dalam usaha dimulai dari, sebagai berikut :

1. Penentuan jenis barang atau jasa yang akan dibuat. Barang atau jasa akan menjadi hasil pengolahan (*output*).
2. Menentukan jenis bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja manusia, dan mesin atau alat yang dibutuhkan dalam kegiatan pengolahan.
3. Penentuan sumber pengadaan dari bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja manusia, dan mesin atau alat dengan mempertimbangkan harga, mutu, dan penawarannya.

#### 2.1.3.4 Manajemen Pemasaran

Menurut Kusinwati (2019) mengemukakan bahwa manajemen pemasaran adalah kegiatan mempelajari pasar, menyusun rencana program, pemasaran, melaksanakan program kegiatan pemasaran, dan mengendalikan kegiatan pemasaran untuk menciptakan, membangun, memelihara, dan mengembangkan manfaat yang saling menguntungkan antara pengusaha dan konsumen. Dalam kegiatan usaha tentu ada pendistribusian atau saluran distribusi dari hasil suatu barang atau produk yang telah di produksi. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh perusahaan untuk menyalurkan produknya sampai ke tangan konsumen pada saat yang diinginkan dan dibutuhkan. Secara fisik saluran distribusi dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Saluran distribusi langsung, yakni saluran distribusi yang langsung dari produsen kepada konsumen.
2. Saluran distribusi semi langsung, yakni saluran distribusi yang hanya menggunakan satu perantara, misalnya melalui pengecer produsen.
3. Saluran distribusi tidak langsung, yakni saluran distribusi yang menggunakan dua atau lebih banyak perantara kepada konsumen.

#### 2.1.3.5 Manajemen Wirausaha

Menurut Wirasmita (1993) dalam bukunya Echdar (2013) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kemampuan yang harus dimiliki dalam berwirausaha, yaitu :

- a. *Self knowledge*, yakni memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dijalankan atau ditekuni.
- b. *Imagination*, yakni memiliki imajinasi, ide, gagasan dan perspektif.
- c. *Partical knowledge*, yakni memiliki kemampuan praktis, misalnya pengetahuan teknik, desain, pembukuan, pemasaran, dan administrasi.
- d. *Search skill*, yakni kemampuan menemukan, berkreasi, dan berimajinasi.
- e. *Foresight*, yakni berpandangan jauh kedepan.
- f. *Computation*, yakni memiliki kemampuan berkomunikasi, bergaul dan senang berhubungan dengan orang lain.

Menurut Dan (1993) dalam bukunya Echdar (2013) mengemukakan bahwa dalam berwirausaha harus memiliki kompetensi, antara lain :

1. *Knowing your business*, yakni harus mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha atau bisnis yang dijalankan.
2. *Knowing the basic business management*, yakni mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis atau usaha.
3. *Having the proper attitude*, yakni memiliki sikap yang baik dan benar terhadap usaha yang dilakukan.
4. *Having adequate capital*, yakni memiliki modal yang cukup, tidak hanya berbentuk materi tetapi juga moril.
5. *Managing finances effectively*, yakni mampu mengatur dan mengelola keuangan secara efektif dan efisien.
6. *Managing time effectively*, yakni mampu mengatur waktu se-efisien mungkin.
7. *Managing people*, yakni mampu merencanakan, mengatur, mengarahkan, menggerakkan, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan usaha.
8. *Satisfying customer by providing high quality product*, yakni memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menyediakan barang atau jasa yang bermutu dan bermanfaat.
9. *Knowing how to compete*, yakni mengetahui strategi atau cara bersaing dalam dunia usaha.
10. *Copying with regulations and paperwork*, yakni membuat aturan atau pedoman yang jelas (tersurat) dalam usaha.

Keuntungan dalam berwirausaha menurut Alma (2000) dalam bukunya Echdar (2013), yaitu :

- a. Dapat mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri
- b. Dapat mendemonstrasikan potensi secara penuh
- c. Dapat memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal
- d. Dapat membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret

Menurut Echdar (2013) mengemukakan bahwa dalam berwirausaha terdapat unsur-unsur utama, yaitu :

- a. Modal, yaitu sebagai sumber utama dalam sebuah usaha.
- b. Lokasi, yaitu sebagai wadah yang akan menjadi tempat bagi usaha yang dijalankan.
- c. Pelanggan, yaitu sebagai sumber pendapatan dan keuntungan.
- d. Rekan atau mitra bisnis, yaitu sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk dapat mengembangkan usaha.

Menurut Krisnawati (2021) mengemukakan bahwa terdapat beberapa sumber daya yang harus dikelola dalam usaha, yaitu :

- a. Sumber daya manusia (*man*)
- b. Uang (*money*)
- c. Metode (*method*)
- d. Material (*materials*)
- e. Mesin (*machine*)

Menurut Krisnawati (2021) mengemukakan bahwa terdapat area fungsional dalam manajemen usaha, meliputi :

1. Pemasaran
2. Sumber daya manusia
3. Operasi atau produksi
4. Keuangan

Dalam sebuah usaha terdapat perencanaan sumberdaya, menurut Abd'rachim (2021) mengemukakan bahwa sumberdaya (*resources*) merupakan berbagai jenis barang atau jasa yang dibutuhkan untuk diolah guna membuat

barang atau jasa yang lain. Berbagai jenis sumberdaya yang dibutuhkan, antara lain :

- a. Bahan baku dan bahan pembantu
- b. Mesin dan peralatan
- c. Tenaga kerja manusia
- d. Teknologi

Menurut Masruroh (2018) mengemukakan bahwa dalam pengembangan ekonomi keluarga melalui kegiatan kewirausahaan dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain :

1. Menggali potensi yang ada di masyarakat dan disekitarnya.
2. Memberikan bekal pengetahuan dan *skill* atau kemampuan dalam bidang yang minati oleh masyarakat.
3. Melakukan pendampingan terhadap usaha produktif dalam dunia usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan sebagai upaya pengembangan ekonomi keluarga melalui kegiatan kewirausahaan dapat dilakukan oleh dua tahap, sebagai berikut :

#### 1. Pembinaan

Menurut Indarti (2020) mengemukakan bahwa pembinaan merupakan kegiatan memberikan arahan serta dorongan untuk dapat menjangkau masyarakat serta sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk memberikan bekal konsep sebelum melakukan suatu pelatihan.

#### 2. Pelatihan

Menurut Kamil (2010) pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar yang dilaksanakan di luar system sekolah, memerlukan waktu yang relative singkat dan lebih menekankan pada praktik. Menurut Ikka (2011) mengatakan bahwa pelatihan mencakup tiga aspek pokok yaitu perolehan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan bakat dalam upaya meningkatkan kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang spesifik.

Menurut Tengoro (2019) mengemukakan bahwa terdapat tiga ciri dalam suatu pengembangan ekonomi keluarga melalui kegiatan kewirausahaan, yaitu :

1. *Doing good*, yaitu menciptakan manfaat untuk banyak orang dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan mereka.
2. *Contribute to change*, yaitu menstimulasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat dalam memproduksi hingga menciptakan transaksi.
3. *Making money*, yaitu menciptakan kesejahteraan dengan mendapatkan hasil dari pengembangan usaha yang terus tumbuh.

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa, diantaranya :

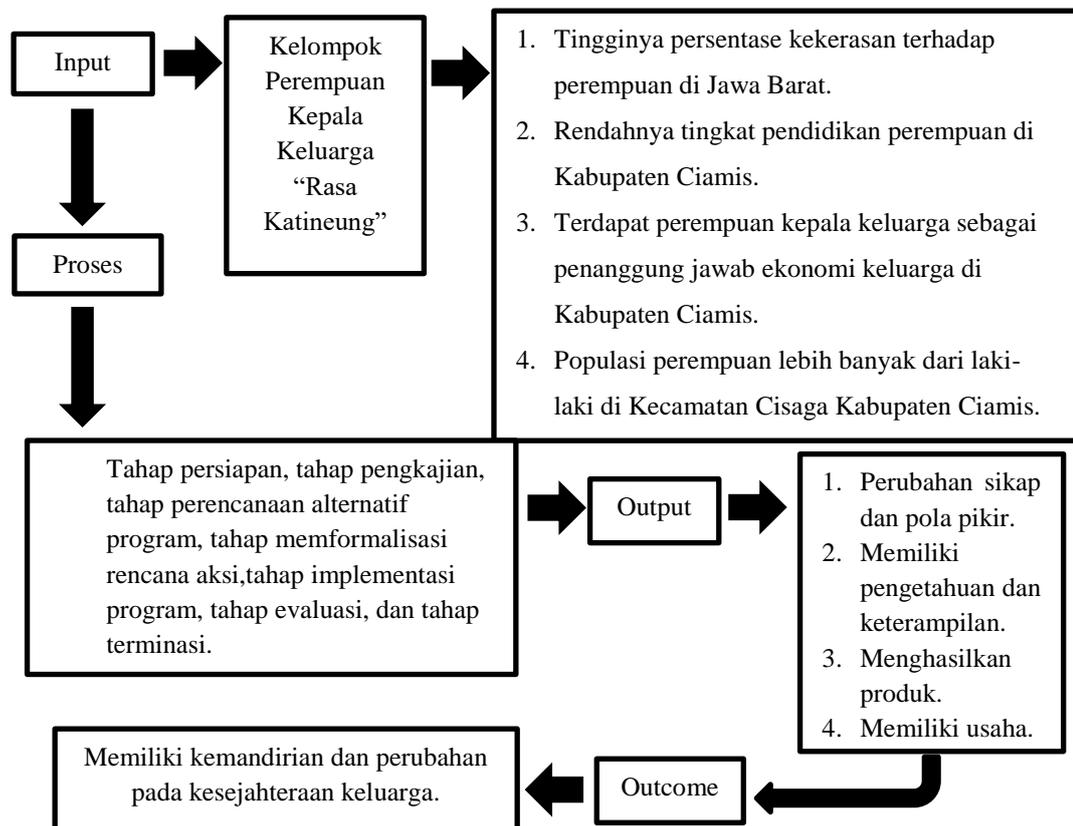
- 2.2.1 Penelitian Skripsi. Julika Sari Lubis, 2021. Peran Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas tentang peran Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Kecamatan Tanjung Balai melalui beberapa program yang sudah diaplikasikan serta memantau pelaksanaan dan pendampingan masyarakat melalui beberapa program dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan serta mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh pihak pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam menerapkan kegiatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
- 2.2.2 Penelitian Skripsi. Trisna Susianda, 2014. Peranan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Janda di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat. Penelitian ini membahas mengenai peranan program PEKKA dalam meningkatkan kesejahteraan janda dan apa saja kendala yang dihadapi PEKKA dalam meningkatkan kesejahteraan janda di kecamatan Tangan-

tangan kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Program PEKKA dalam meningkatkan kesejahteraan janda dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi PEKKA dalam meningkatkan kesejahteraan janda di kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

- 2.2.3 Penelitian Skripsi. Puput Faiqoh, 2019. Pemberdayaan Perempuan Melalui Home Industri Batik Sekar Jagad di Dusun Tanuraksan Desa Gemeksekti Kabupaten Kebumen. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini membahas tentang program pemberdayaan perempuan melalui *home* industri Batik Sekar Jagad di Dusun Tanuraksan Desa Gemeksekti Kabupaten Kebumen yang dilatarbelakangi oleh sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan membatik secara turun temurun dengan rata-rata pendidikan terakhir adalah sekolah dasar dan tergolong keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan *home* industri ini membuka lapangan pekerjaan serta memanfaatkan potensi masyarakat Dusun Tanuraksan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
- 2.2.4 Penelitian Skripsi. Betti Aryani, 2017. Peran Perempuan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini membahas mengenai menyikapi permasalahan terhadap rendahnya ekonomi sebuah keluarga, untuk mengatasinya penulis membuat peranan perempuan juga bisa membantu perekonomian keluarga dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA), para perempuan atau ibu rumah tangga di Desa Tanjung Setia mempunyai inisiatif untuk membantu suaminya dengan berdagang ikan agar terpenuhinya kebutuhan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif.
- 2.2.5 Penelitian Skripsi. Yesi Dwi Aptika, 2018. Upaya Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini membahas tentang kontribusi seorang perempuan terhadap kesejahteraan keluarga. Terdapat faktor penyebab seorang perempuan berkontribusi dalam perekonomian keluarga, antara lain : kesempatan memperoleh pendidikan yang terbuka untuk pria atau wanita, perempuan sebagai pencari nafkah utam, keharusan perempuan berkarya menambah penghasilan suami, perempuan yang ditinggal mati suaminya, perempuan yang diceraikan oleh suaminya, dan perempuan yang menjadi ibu pada usia muda tanpa suami. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual menurut Sugiyono (2017) yaitu suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu,

antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan di amati atau di ukur melalui penelitian yang akan di laksanakan.

Berdasarkan dari **Gambar 2.1** kerangka konseptual peneliti menggambarkan kerangka berpikir dari penelitian ini. Kelompok Perempuan Kepala Keluarga merupakan salah satu kelompok yang terdapat di Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga, di Desa Bangunharja 40% masyarakatnya adalah kepala keluarga yang di kepalai oleh perempuan akan tetapi terdapat juga sekitar 30% perempuan yang membantu perekonomian keluarganya. Dimana dalam pelaksanaannya masyarakat masih mengalami beberapa kesulitan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu :

1. Perempuan sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga.
2. Kebutuhan perempuan yang belum dapat terpenuhi.
3. Minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan makanan ringan.
4. Belum adanya pelatihan dan pembinaan dalam pembuatan makanan ringan.

Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan UPTDP5A untuk membuat program pemberdayaan masyarakat dengan sarannya adalah Kelompok Perempuan Kepala Keluarga. Melalui pemberdayaan kelompok PEKKA ini, masyarakat diberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai pembuatan produksi aneka makanan ringan dan seputar dunia usaha termasuk juga mengenai penjualannya yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi anggota kelompok PEKKA dalam rangka pengembangan ekonomi keluarga.

#### **2.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dari kerangka berpikir yang telah dijelaskan maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Proses Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Kegiatan Pembuatan Makanan Ringan?
- 2) Bagaimana Hasil Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga melalui Pembuatan Makanan Ringan?